

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selaku negara berkembang, Indonesia ada tujuan nasional yang diwujudkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program pembangunan. Menurut (Adyan, 2022) pembangunan (*development*) diartikan sebagai proses perubahan yang dilaksanakan secara menyeluruh pada berbagai aspek meliputi sosial, ekonomi, politik, budaya, kelembagaan, pendidikan, pertahanan, teknologi, serta sarana dan prasarana. Suatu pembangunan diimplementasikan dalam rangka melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek tersebut. Di Indonesia sendiri, perencanaan pembangunan dibuat dengan berdasar pada prinsip demokrasi yaitu mewujudkan pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan demikian, dalam pembangunan masyarakat memegang peran utama, sedangkan pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan bimbingan yang mendukung pada keberhasilan pembangunan. Adanya peran masyarakat yang demikian tidak lain adalah untuk melahirkan masyarakat yang mandiri sesuai dengan kepribadian serta nilai-nilai luhur bangsa yang mengutamakan kekuatan etika dan moral (Adyan, 2022).

Tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang di UUD 1945, dimana pada hakikatnya ialah untuk menciptakan masyarakat yang adil serta Makmur, baik dari segi material ataupun spiritual berdasarkan Pancasila. Selain itu, juga untuk menciptakan masyarakat yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam

suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjamin keamanan ataupun ketertibannya secara dinamis. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai rencana dengan mengadopsi dari negara maju atas melahirkan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Sasaran dari rencana ini salah satunya yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang merata bagi seluruh masyarakat.

(Yorisca, 2016) mengartikan pembangunan nasional sebagai upaya konsisten untuk menjadikan bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar dengan bangsa lainnya yang dianggap lebih maju, baik dalam taraf hidup maupun dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam setiap upaya pembangunan yang dilakukan umumnya akan senantiasa menitikberatkan pada strategi pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial. Secara sederhana, pembangunan nasional dipahami sebagai suatu proses yang ditujukan untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh yang disesuaikan dengan sistem sosial pada kelompok masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah memegang wewenang yang seluas-luasnya dalam upaya perubahan tersebut dengan tetap memperhatikan hak-hak dari masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik secara jasmani maupun rohani.

Hal ini secara lebih lanjut dibahas dalam salah satu perluasan ilmu ekonomi yang berkaitan dengan upaya pembangunan yaitu ilmu ekonomi pembangunan. Dalam ilmu ekonomi pembangunan akan memperluas kesempatan masyarakat dengan mendukung peningkatan kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan melalui sektor publik maupun swasta. Ekonomi pembangunan

memberikan kesiapan kepada setiap komponen pemerintahan agar menjadi perencana di sektor pembangunan ekonomi sehingga dapat berpartisipasi dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Cabang ilmu ini juga akan membahas tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai pelaku ekonomi pembangunan dalam menjalankan roda perekonomian untuk mengupayakan terciptanya perekonomian yang memiliki kualitas dan kuantitas, serta terhindar dari kemiskinan (Kambey et al., 2023).

Dalam konteks pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menjadi suatu indikator krusial yang digunakan untuk melihat keberhasilan dari rencana pembangunan yang telah dilakukan. Umumnya, negara akan senantiasa berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal dan menurunkan angka kemiskinan. Sementara itu, pengentasan kemiskinan dapat tercipta apabila ekonomi dari negara tersebut mengalami pertumbuhan yang positif. Namun dalam praktiknya di negara Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan kemunculan berbagai masalah baru seperti peningkatan jumlah masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kondisi ini kemudian menjadikan kemiskinan sebagai permasalahan kompleks yang dihadapi oleh negara ini, terlihat dari banyaknya wilayah di Indonesia dengan masyarakat miskin yang tinggal di dalamnya.



Gambar 1. 1. Provinsi dengan Persentase Masyarakat Miskin di Indonesia

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2022

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk sebagai salah satu Provinsi dengan masyarakat miskin terbanyak di Indonesia dengan persentase sebesar 20,05% sehingga menempatkannya pada posisi ke tiga setelah Provinsi Papua dan Papua Barat. Masyarakat miskin di Nusa Tenggara Timur tersebar di seluruh Kabupaten atau Kota yang berjumlah 22 dan berada di setiap kepulauan. Secara geografis, Nusa Tenggara Timur ada diantara perbatasan 2 negara yaitu Australia serta Timor Leste. Sementara batas baratnya berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat, sedangkan batas timur dan selatan masing-masing berbatasan dengan Timor Leste dan Samudera Hindia, dan batas utara Laut Flores. Letak dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian menjadikannya sebagai wilayah dengan iklim tropis, sehingga tidak diherankan bahwa Provinsi ini sering kali mengalami kemarau yang berkepanjangan yang berdampak pada berkurangnya hasil produksi pangan. Kekeringan yang terjadi

hampir setiap tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai akibat dari musim kemarau ini menyebabkan munculnya permasalahan lain diluar kemiskinan diantaranya seperti masalah gizi buruk, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga tingginya angka putus sekolah.

Menurut (Akbar & Arifin, 2023) tingkat kemiskinan di NTT terjadi penurunan di tahun 2015 hingga 2020, tetapi kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan nilai sebesar 1167,31 yang menjadikannya sebagai salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Kemiskinan yang kemudian dipahami sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya baik dari segi pangan maupun non-pangan bisa disebabkan banyak faktor. Salah satu faktor penyebab kemiskinan di Provinsi ini adalah tingginya angka konsumsi rokok dimana sekitar 55,7% masyarakatnya diketahui memiliki kebiasaan merokok. Angka tersebut bakna jauh lebih tinggi dari rata-rata perokok dalam suatu Provinsi secara nasional yaitu berkisar 29,3% setiap wilayahnya. Selain itu, kemiskinan di Nusa Tenggara Timur juga merupakan akibat dari ketidakseimbangan pasokan dengan peningkatan jumlah populasi, dan pendapatan per kapita dalam Provinsi tersebut. Pertambahan jumlah masyarakat dan pengangguran dalam suatu wilayah telah lama dianggap sebagai kendala utama dari upaya pembangunan yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan (Akbar & Arifin, 2023).

Kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur ini cenderung disebabkan oleh tingkat produktivitas masyarakat yang rendah. Sebagai dampaknya maka akan berimplikasi pada tingkat

pertumbuhan ekonomi yang rendah pula (Nalle et al., 2022). Dengan demikian, baik pemerintah pusat ataupun daerah harus memiliki rasionalitas akan hal tersebut dalam menyusun rencana program pembangunan yang mengutamakan pada upaya peningkatan produktivitas dan kemandirian masyarakat di berbagai kegiatan ekonominya. Istilah pertumbuhan ekonomi dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan pada hasil produksi barang ataupun jasa yang jumlahnya semakin bertambah tahun ke tahun sebagaimana direpresentasikan melalui ukuran Produk Nasional Bruto (PNB) serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan negatif yang bertolak belakang. Artinya, apabila nilai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat maka angka kemiskinan pada wilayah tersebut justru akan menurun. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya yaitu sistem ekonomi. Menurut (Anggraeni et al., 2022) menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu konsep atau mekanisme yang fundamental untuk dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sistem ekonomi akan menentukan proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan untuk tujuan ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi menjadi sangat penting karena perannya diperlukan untuk menjalankan perekonomian dari suatu negara (Anggraeni et al., 2022).

Permasalahan ekonomi yang terjadi pada suatu negara dapat dipengaruhi oleh pemilihan sistem ekonomi yang mungkin tidak sesuai dengan negara tersebut. Oleh karena itu, setiap negara dalam halnya menentukan sistem ekonomi

harus memperhatikan tiga komponen utama yang menjadi faktor penyebab munculnya permasalahan ekonomi. Komponen ini diantaranya meliputi jenis produk atau layanan yang akan diproduksi (*what*), pihak yang akan dituju dalam produksi (*who*), serta cara yang diterapkan untuk memproduksinya (*how*). Dengan adanya sistem ekonomi yang tepat, maka pemerintah akan lebih mudah mengatur dan mengorganisir segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakatnya untuk memiliki hidup yang lebih sejahtera (Effendi et al., 2019).

Terdapat beberapa model sistem ekonomi yang dapat diaplikasikan beragam negara di dunia, ialah sistem ekonomi liberal, Sosial dan Ekonomi, serta ekonomi Islam. Ketiga model sistem ekonomi ini telah muncul sejak lama dan terus mengalami perkembangan dalam praktiknya. Dalam penentuan sistem ekonominya, suatu negara diharuskan untuk mempertimbangkan adanya cakupan institusi, anggaran, serta pembuat keputusan yang merepresentasikan seluruh kegiatan ekonomi. Sehingga nantinya akan timbul kecenderungan bahwa sistem ekonomi di suatu negara akan berhubungan erat dengan sistem politik negara tersebut, khususnya dalam hal ideologinya. Sehingga tidak diherankan bahwa negara Indonesia dikatakan menganut sistem ekonomi Pancasila yang tidak lain adalah ideologi dari negara ini.

Namun, muncul beberapa pandangan yang menganggap bahwa ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi ekonomi ini merupakan bentuk penerapan dari sistem Sosial dan Ekonomi *ala* Indonesia. Hal ini karena banyaknya kesamaan yang ditemukan antara ciri khas ekonomi Pancasila dengan Sosial dan Ekonomi. Sebagaimana diungkapkan menurut (Fitrianur Syarif, 2019)

bahwa ciri-ciri ekonomi Pancasila yang dimiliki oleh negara Indonesia diantaranya adalah; (1) Perekonomian yang digerakkan oleh rangsangan sosial, ekonomi dan moral; (2) Perekonomian memiliki keterkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa yang menekankan pada solidaritas sosial; (3) Perekonomian berkaitan dengan persatuan bangsa sehingga setiap kebijakan ekonomi yang dibuat harus mencerminkan sifat nasionalisme; serta (4) Perekonomian memperlihatkan ada keseimbangan antar perencanaan sentral dan penekanan desentralisasi pada pelaksanaan kegiatan ekonomi (Fitrianur Syarif, 2019)

Sistem ekonomi Indonesia telah diatur secara normatif di Pasal 33 UUD 1945 yang mencakup tentang beberapa hal yakni; (a) Penyusunan perekonomian dilakukan berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan; (b) Sektor produksi yang penting bagi negara dan yang memengaruhi keberlangsungan hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara; (c) Kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah dataran dan lautan di bumi harus dikuasai negara dan dimanfaatkan secara besar-besaran untuk kemakmuran rakyat; (d) Penyelenggaraan perekonomian nasional dilakukan berlandaskan nilai demokrasi ekonomi, wawasan lingkungan, serta mempertahankan kemandirian, kemajuan, keseimbangan, dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa Indonesia menganut sistem Sosial dan Ekonomi yang terlihat dalam pelaksanaan perekonomiannya yang sebagian besar dikuasai oleh negara.

Pada awalnya, sistem ekonomi yang diyakini negara ini ialah sistem ekonomi liberal yang menyerahkan seluruh kegiatan ekonomi kepada masyarakat

untuk diselenggarakan secara mandiri. Namun seiring berjalannya waktu karena dipengaruhi oleh paham komunisme dalam sejarahnya, maka terjadi perubahan sistem ekonomi di Indonesia menjadi sistem Sosial dan Ekonomi. Pada masa orde baru, sistem ekonomi dikembalikan dalam bentuk ekonomi demokrasi yang tidak bertahan lama yaitu hanya pada masa reformasi. Setelahnya, pemerintah menyelenggarakan sistem ekonomi secara sosial hingga saat ini (Siagian, n.d.).

Sosial dan Ekonomi didefinisikan sebagai suatu pola institusional perekonomian yang berfokus pada otoritas pemerintah pusat untuk mengontrol sarana produksi dan proses produksinya. Tujuan dari Sosial dan Ekonomi sejatinya adalah untuk menghilangkan praktik eksploitasi SDA dan SDM yang sering terjadi dalam ekonomi liberal. Harapannya, melalui Sosial dan Ekonomi maka masyarakat tidak hanya mementingkan kebutuhan pribadi namun juga kebutuhan bersama. Dalam Sosial dan Ekonomi, memiliki prinsip kepemilikan negara secara keseluruhan untuk segala perencanaan dan produksi yang terpusat. Sehingga, beberapa ahli beranggapan bahwa penerapan Sosial dan Ekonomi tidak memiliki ketauladanan dan menyebabkan negara penganutnya tidak dapat menjaga kepercayaan pasar ataupun menjalankan desentralisasi ekonomi dengan baik. Sebagai akibatnya yaitu adanya ketidaktegasan dalam sistem birokrasi, menurunnya produktivitas, melambatnya pertumbuhan ekonomi, serta berkurangnya pasokan bagi masyarakat (Agus Waluyo, 2018).

Sosial dan Ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia memberikan kedudukan tertinggi bagi negara dalam menjalankan perekonomian menggunakan kepemilikan masyarakat luas untuk kepentingan industri. Secara

sederhana, Sosial dan Ekonomi menempatkan negara sebagai pemeran utama dalam mengatur perekonomian masyarakat sepenuhnya. Umumnya, Sosial dan Ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi untuk mengurangi potensi terjadinya penindasan ekonomi. Namun risiko yang harus diterima dari penerapan Sosial dan Ekonomi adalah hilangnya kebebasan masyarakat untuk mengembangkan daya kreasinya dalam melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi (Effendi et al., 2019).

Menurut (Anggraeni et al., 2022) mengungkapkan bahwa Sosial dan Ekonomi yang menjanjikan tentang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta menjamin masyarakat yang terbebas dari ketidakadilan, kemiskinan, atau eksploitasi berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Pasalnya, penerapan Sosial dan Ekonomi justru memunculkan banyak perbudakan dan kemiskinan dalam masyarakat. Hilangnya insentif bagi masyarakat agar berinovasi sebab kegiatan ekonomi ada di bawah kendali negara dan kepemilikan yang dibatasi menyebabkan kreativitas masyarakat menjadi menurun. Kegagalan negara dalam mengalokasikan anggaran untuk mengelola sumber daya secara optimal menimbulkan adanya ketidakadilan dan kemiskinan.

Berkaitan dengan banyaknya wilayah di Indonesia dengan angka kemiskinan yang tinggi salah satunya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat kemungkinan bahwa hal ini dipengaruhi sistem ekonomi yang diimplementasikan pada wilayah tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia menganut sistem ekonomi demokrasi yang mengadopsi Sosial dan Ekonomi, maka akan berkorelasi dengan karakteristik sistem ekonomi ini yang

dapat berdampak pada keberlangsungan kegiatan ekonomi. Maka sebab itu, penulis tertarik menjalankan penelitian mengenai “**Pengaruh Sosial dan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur**”.

B. Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya untuk melihat pengaruh Sosial dan Ekonomi pada tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka penulis dapat memberikan perumusan masalah di penelitian ini yakni berikut:

1. Bagaimana Perokok tembakau, tingkat partisipasi murni, dan tingkat pendapatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) saling berinteraksi dan mempengaruhi tingkat kemiskinan?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah di penelitian ini ialah mengenai pengaruh Sosial dan Ekonomi pada tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Setiap kebijakan yang diselenggarakan pemerintah tentunya memiliki beberapa dampak baik secara positif maupun negatif yang dijadikan sebagai risiko dari penyelenggaraan kebijakan tersebut. Salah satu kebijakan yang rentan menyebabkan berbagai masalah dan berdampak negatif bagi masyarakat adalah kebijakan dalam sektor ekonomi, misalnya seperti penerapan sistem ekonomi yang apabila tidak tepat maka akan menuntun masyarakat ke dalam lingkaran kemiskinan. Sistem ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini ialah Sosial dan Ekonomi yang dinilai berkaitan dengan kejadian kemiskinan dalam suatu wilayah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis atas menjalankan penelitian ini ialah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan antara beberapa faktor Sosial dan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Ini mencakup analisis terhadap kebiasaan merokok tembakau dalam sebulan terakhir, tingkat angka partisipasi murni, serta tingkat pendapatan. Dengan memahami korelasi antara variabel-variabel ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika kemiskinan di wilayah tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Sementara manfaat yang diinginkan atas ada penelitian ini ialah:

a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diinginkan bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam ilmu ekonomi pembangunan untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang sistem Sosial dan Ekonomi dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan suatu wilayah. Selain itu, harapannya penelitian ini bisa menjadi pedoman atau acuan untuk penelitian baru di masa depan yang memiliki lingkup pembahasan sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

b. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diinginkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam menambah informasi serta bahan masukan dalam pengembangan atau pembuatan inovasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat di penelitian ini. Selain itu, harapannya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pengamalan ilmu yang

diperoleh pada waktu menempuh pendidikan dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan itu sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yakni usaha yang dijalankan untuk membandingkan serta kemudian digunakan sebagai sumber inspirasi untuk penelitian berikutnya. Di sisi lain, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti menentukan posisi penelitian mereka serta memperlihatkan keunikan penelitian tersebut. Dalam bagian ini, peneliti akan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang sedang dipelajari.

Penelitian yang dijalankan oleh (Fadliyah & Ady, 2015), dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Jawa Timur. Sedangkan pendapatan dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Jawa Timur. Sedangkan secara simultan tingkat pendidikan, pendapatan dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Jawa Timur.

Penelitian yang dijalankan oleh (Marisca & Sari, 2016), dengan judul “Analisis Pengaruh Konsumsi Rokok Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”. Temuan penelitian ini menunjukkan bila saat Garis kemiskinan naik, maka konsumsi rokok juga hendak meningkat. Variabel Garis kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan pada konsumsi rokok di Jawa Tengah pada